

Proposal “Deal of the Century” dan Dampaknya bagi Proses Perdamaian Palestina-Israel

Broto Wardoyo¹

¹*Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia*

SUBMISSION TRACK

Received : 28 February 2021
Final Revision : 14 September 2021
Available Online : 01 November 2021

KEYWORD

deal of the century, peace process, mediator, Palestine, Israel, the United States

KATA KUNCI

kesepakatan abad ini, proses perdamaian, mediator, Palestina, Israel, Amerika Serikat

CORRESPONDENCE

E-mail : broto09@ui.ac.id
Phone : 0818757326

ABSTRACT

In January 2020, President Donald Trump put forward a peace proposal which he claimed to be the “deal of the century”. It is a peace proposal that offers general framework on settlement of borders, sovereignty of the Palestinian state, the status of Jerusalem, and refugees’ issue as well as a framework on economic cooperation between Palestine and Israel which Trump insisted as a fair final solution for the Palestinian-Israeli conflict. This article seeks to assess the impact of this proposal to the Palestinian-Israeli peace process. In doing so, this article compares this proposal with previous agreements and concludes that this proposal brings negative, rather than positive, impacts to the peace process since it is not based on a balance positioning between the two conflicting parties. This proposal strengthens Israeli’s claim and hence enhances their position in the negotiation which indicating the inability of the United States to serve as an honest broker to the peace process. In addition, this proposal was put forward by President Trump during an unfavorable condition in both Palestinian and Israeli domestic politics. The only positive aspect of this proposal is that it can serve as a reason to restart negotiation process. Therefore, this proposal should be considered only as a steppingstone to open another round of peace negotiation between Palestine and Israel and should not be implemented as it is.

ABSTRAK

Pada akhir bulan Januari 2020, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan rencana perdamaian yang dia klaim sebagai “deal of the century” atau “kesepakatan abad ini”. Proposal ini merupakan kerangka umum yang menawarkan penyelesaian final masalah perbatasan, status negara Palestina, status Yerusalem, dan pengungsi yang diklaim oleh Trump sebagai tawaran yang adil bagi kedua pihak. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap proposal ini dengan menjawab pertanyaan: bagaimanakah dampak dari proposal ini terhadap masa depan proses perdamaian Palestina-Israel? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini membandingkan proposal ini dengan proposal-proposal terdahulu dan menyimpulkan bahwa proposal “kesepakatan abad ini” memiliki dampak yang negatif terhadap proses perdamaian karena proposal ini tidak dibangun atas dasar keseimbangan posisi antara Palestina dan Israel dalam proses negosiasi dan hanya meletakkan Israel dalam posisi tawar yang lebih kuat sehingga tidak akan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi perdamaian. Selain itu, proposal ini lahir di tengah kondisi politik yang kurang menguntungkan bagi proses negosiasi, terutama akibat dinamika politik domestik di Palestina maupun Israel. Dengan demikian, keputusan untuk menolak proposal ini sangatlah tepat meski proposal ini bisa dijadikan pintu masuk untuk dimulainya kembali proses negosiasi yang telah lama mengalami kemandekan..

Pendahuluan

Pada akhir bulan Januari 2020, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan rencana perdamaian yang dia klaim sebagai “deal of the century” atau “kesepakatan abad ini”. Proposal yang memiliki nama resmi “Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People”¹ ini mendapat tanggapan dingin dari media-media utama dunia. BBC menulis bahwa rencana tersebut memberikan banyak keuntungan bagi Israel namun merugikan Palestina karena wilayah mereka akan terpotong, tidak memiliki kedaulatan yang penuh, dikelilingi oleh wilayah Israel, dan dipenuhi oleh pemukiman Yahudi.² The Guardian bahkan menuduh bahwa proposal ini pada dasarnya adalah langkah nyata untuk mendukung aneksasi Israel dan menghilangkan hak bangsa Palestina untuk berdaulat sehingga proposal tersebut hanya akan memperpanjang konflik alih-alih berkontribusi pada perdamaian.³ The Washington Post menyebut proposal tersebut sebagai sebuah deklarasi penyerahan Palestina pada Israel.⁴

Proposal perdamaian tersebut melengkapi kebijakan-kebijakan pro-Israel

yang sebelumnya sudah diadopsi oleh Presiden Trump. Pada bulan Desember 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel⁵ dan bahkan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada bulan Mei 2018.⁶ Langkah tersebut mendapatkan tentangan dari banyak negara, termasuk Palestina. Pada bulan Agustus 2018, Trump mengakhiri kontribusi Amerika Serikat dalam UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugee in the Near East), lembaga PBB yang mengurus pengungsi Palestina.⁷ Pada bulan September 2018, kantor Palestine Liberation Organization (PLO) di Washington, DC. ditutup oleh pemerintahan Trump.⁸ Kebijakan Amerika Serikat yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina semakin kentara ketika pada bulan Januari 2019 Trump menghentikan semua bentuk bantuan bilateral Amerika Serikat bagi Palestina sebagai implikasi dari Anti-Terrorism Clarification Act yang diadopsi Kongres tahun 2018.⁹ Pada bulan Maret 2019, Trump memberikan pengakuan atas wilayah Dataran Tinggi Golan, yang disengketakan oleh Israel dan Suriah sejak

¹ “Peace to Prosperity”, White House, diakses pada 16 Oktober 2020,

<https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperty/>.

² Jeremy Bowen, “Trump’s Middle East peace plan: ‘deal of the century’ is huge gamble,” BBC News, 29 Januari 2019, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51263815>, diakses pada 16 Oktober 2020.

³ Ian Black, “This ‘deal of the century’ for the Middle East will be just another bleak milestone,” The Guardian, 30 Januari 2019, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/30/donald-trump-israel-palestinians-middle-east>, diakses pada 16 Oktober 2020.

⁴ Ishaan Tharoor, “Trump’s ‘deal of the century’ is no deal at all,” The Washington Post, 29 Januari 2019, <https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/28/trumps-deal-century-is-no-deal-all/>, diakses pada 16 Oktober 2020.

⁵ “Statement by President Trump on Jerusalem, December 6, 2017”, White House, diakses pada 16 Oktober 2020, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem/>.

⁶ “President Donald J. Trump Keeps His Promise To Open U.S. Embassy In Jerusalem, Israel”, White House, diakses pada 16 Oktober 2020, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-keeps-promise-open-u-s-embassy-jerusalem-israel>.

⁷ “On US Assistance to UNRWA”, State Department, diakses 16 Oktober 2020, <https://www.state.gov/on-u-s-assistance-to-unrwa/>.

⁸ “Closure of the PLO Office in Washington”, State Department, diakses 16 Oktober 2020, <https://www.state.gov/closure-of-the-plo-office-in-washington/>.

⁹ Yolande Knell, “US stops all aid to Palestinians in West Bank and Gaza”, BBC News, 1 Februari 2019, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47095082>, diakses pada 16 Oktober 2020.

tahun 1949.¹⁰ Puncak dukungan tersebut ada pada proposal “kesepakatan abad ini”.

Hubungan khusus Amerika Serikat-Israel sebenarnya baru berkembang pada dekade 1960-an. Menurut Bar-Siman-Tov, terminologi “hubungan khusus” atau “special relationship” antara kedua negara merujuk pada “a unique and unparalleled partnership, with high levels of friendship, amity, trust, and political and military cooperation.”¹¹ Dengan demikian, hubungan tersebut tidak hanya tercipta di level pemerintahan namun juga di level masyarakat. Sharp mencatat bahwa selama periode 1946-2019, Amerika Serikat telah menggelontorkan dana sebesar 34,281 triliun USD dalam bentuk bantuan ekonomi, 101,79 triliun USD dalam bentuk bantuan militer, serta 6,411 triliun USD dalam bentuk sistem pertahanan misil.¹² Selain itu, mengingat Amerika Serikat juga merupakan produsen utama sistem persenjataan negara-negara Arab, Amerika Serikat senantiasa mempertimbangkan qualitative military edge (QME) atau keunggulan militer kualitatif Israel atas negara-negara Arab dalam penjualan senjata ke negara-negara Arab. Artinya, Amerika Serikat meletakkan keamanan dan kepentingan Israel sebagai prioritas penting dalam kebijakan luar negerinya. Kedekatan hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel juga didukung oleh kuatnya lobi Israel dalam politik domestik Amerika Serikat. Mearsheimer dan Walt mendefinisikan lobi Israel sebagai “loose coalition of individuals and organizations that actively work to shape U.S. foreign policy in a pro-Israel

direction.”¹³ Lobi tersebut tidak hanya merujuk pada political lobbyist saja namun juga pada kelompok masyarakat yang bersimpati dan memberikan dukungan kepada Israel. Keberadaan kelompok pelobi tersebut membuat kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah tidak senantiasa didikte oleh kepentingan nasional Amerika Serikat namun justru lebih mengedepankan keamanan Israel.¹⁴

Kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam penyelesaian masalah Palestina-Israel tersebut memunculkan pertanyaan mengingat peran Amerika Serikat dalam proses perdamaian Palestina-Israel sangatlah sentral. Kehadiran Amerika Serikat sebagai mediator perdamaian tidak pernah bisa digantikan terlepas dari berbagai kritik bahwa Amerika Serikat tidak menjalankan peran sebagai “honest broker”¹⁵. Keberpihakan Amerika Serikat kepada Israel membuat ruang gerak Palestina menjadi semakin sempit dalam upaya mendapatkan kedaulatannya. Dalam konteks tersebut, tulisan ini akan menjawab pertanyaan terkait dengan dikeluarkannya proposal “kesepakatan abad ini” oleh Presiden Trump. Pertanyaan yang diajukan adalah: bagaimanakah dampak dari proposal ini terhadap masa depan proses perdamaian Palestina-Israel?

¹⁰ “Proclamation on Recognizing the Golan Heights as Part of the State of Israel”, US Embassy in Israel, diakses 16 Oktober 2020, <https://il.usembassy.gov/proclamation-on-recognizing-the-golan-heights-as-part-of-the-state-of-israel/>.

¹¹ Yaacov Bar-Siman-Tov, “United States and Israel since 1948: a ‘special relationship’?”, *Diplomatic History* 22, No. 2 (1998): 231-262.

¹² Jeremy M. Sharp, “US foreign aid to Israel,” CRS Report, (16 November 2020): 2.

¹³ John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, *The Israel lobby and US foreign policy* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007), 111.

¹⁴ John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, *The Israel lobby and US foreign policy*, 336.

¹⁵ Pada 18 Oktober 1991, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Baker, menjanjikan bahwa Amerika Serikat akan menjadi “honest broker” dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Namun, Amerika Serikat gagal menjadi “honest broker” dalam perundingan Madrid dan Oslo dengan mendorong diadopsinya agenda-agenda Israel dan enggan menekan Israel untuk memberikan ruang tawar-menawar yang setara bagi Palestina. Jacinta Sanders, “Honest brokers? American and Norwegian facilitation of Israeli-Palestinian negotiations (1991-1993),” *Arab Studies Quarterly* 21, No. 2 (1999): 47-70.

Kajian akademik terdahulu mengenai “Peace for Prosperity” ini sendiri belum banyak dilakukan. Dalam beberapa jurnal utama kajian Timur Tengah, ada beberapa kajian yang terkait dengan usulan Trump maupun Rencana Kushner—yang merupakan draf awal dari proposal “kesepakatan abad ini”. Anziska menulis bahwa usulan Trump lebih menguntungkan Israel karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel bergerak lebih cepat dibandingkan Presiden Palestina untuk mendorong kebijakan Amerika Serikat di bawah Trump yang lebih menguntungkan mereka.¹⁶ Sementara itu, Khalidi melihat kebijakan Trump pada dasarnya merupakan kelanjutan dari bias Amerika Serikat untuk pro terhadap Israel.¹⁷ Pillar dan Elgindi melihat adanya pergeseran paradigma yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dalam Rencana Kushner dari melihat isu Palestina-Israel dalam kerangka politik menjadi kerangka ekonomi yang membuat isu Palestina-Israel tereduksi pada isu ekonomi semata.¹⁸ Dengan demikian, tulisan ini memberikan tawaran baru untuk melihat kebijakan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini dibagi menjadi empat bagian. Di bagian pertama, telaah mengenai negosiasi dan proposal perdamaian terdahulu akan diberikan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap proposal “kesepakatan abad ini”. Selain itu, kajian mengenai usulan-usulan damai yang sudah ada sebelumnya yang diusulkan oleh Amerika Serikat, baik secara individual maupun dalam kerangka Kelompok Kuartet, juga

dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan proposal “kesepakatan abad ini”. Dari kerangka yang dibangun tersebut, di dua bagian selanjutnya akan dibahas variabel-variabel penting yang menjelaskan signifikansi “kesepakatan abad ini” dalam proses perdamaian. Untuk memahami kompleksitas masa depan proses perdamaian, “kesepakatan abad ini” perlu diletakkan dalam kerangka konstelasi politik domestik, baik di Palestina maupun Israel terutama pasca berakhirnya perundingan Camp David tahun 2000 yang dijelaskan dalam bagian kedua. Di bagian ketiga dijelaskan bagaimana proposal ini juga harus dipertimbangkan dalam konteks naik dan turunnya peran mediasi Amerika Serikat dalam perdamaian Palestina-Israel. Bagian terakhir merupakan penutup.

Tulisan ini berpandangan bahwa proposal “kesepakatan abad ini” memiliki dampak yang negatif terhadap proses perdamaian karena proposal ini tidak dibangun atas dasar keseimbangan posisi antara Palestina dan Israel dalam proses negosiasi dan hanya meletakkan Israel dalam posisi tawar yang lebih kuat sehingga tidak akan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi perdamaian. Selain itu, proposal ini lahir di tengah kondisi yang kurang menguntungkan bagi proses negosiasi, terutama akibat dinamika politik domestik di Palestina maupun Israel. Dengan demikian, keputusan untuk menolak proposal ini sangatlah tepat, meski proposal ini bisa dijadikan pintu masuk untuk dimulainya kembali proses negosiasi yang telah lama mengalami kemandekan.

Kerangka Teoritik: Proposal Perdamaian Palestina-Israel Terdahulu dan Faktor-Faktor Determinannya

Untuk melakukan penilaian atas proposal “kesepakatan abad ini”, tulisan ini melakukan studi komparasi dengan proposal-proposal yang telah ada, baik yang disepakati dalam perundingan damai Palestina-Israel

¹⁶ Seth Anziska, “Neither two states nor one: The Palestine Question in the age of Trump,” *Journal of Palestine Studies* 46, No. 3 (2017): 57-74.

¹⁷ Rashid I. Khalidi, “And now what? The Trump administration and the question of Jerusalem,” *Journal of Palestine Studies* 47, No. 3 (2018): 93-102.

¹⁸ Paul R. Pillar, “The Kushner Plan: Keeping Israeli-Palestinian peace out of reach,” *Journal of Palestine Studies* 48, No. 4 (2019): 113-120 dan Khaled Elgindi, “Trump’s dangerous vision for Palestine,” *Journal of Palestine Studies* 48, No. 4 (2019): 103-112.

maupun yang diusulkan secara unilateral oleh Amerika Serikat. Telaah mengenai proposal-proposal tersebut dilakukan untuk menemukan faktor-faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dari proposal perdamaian tersebut.

Studi komparasi atau “comparative analysis” sendiri merupakan metode yang paling sering digunakan dalam kajian ilmu politik maupun hubungan internasional.¹⁹ Ada beragam cara untuk melakukan studi komparasi, namun biasanya pilihan berkisar pada “method of difference” atau “method of agreement”.²⁰ Dalam mencari basis perbedaan maupun persamaan, peneliti dapat menggunakan basis teoritik namun bisa juga dilakukan dengan menggunakan studi kasus lain sebagai model dasar.²¹ Tulisan ini melakukan yang kedua dengan menggunakan kasus-kasus terdahulu sebagai model untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penilaian atas kasus yang diangkat dalam tulisan ini—“kesepakatan abad ini”.

Proses perdamaian Palestina-Israel merupakan isu yang telah banyak dibahas oleh para pengkaji hubungan internasional. Bagian ini membahas mengenai perkembangan proses perdamaian Palestina-Israel, komparasi muatan kesepakatan dalam proses perdamaian Palestina-Israel, dan variabel-variabel yang menyebabkan kegagalannya. Proses perdamaian Palestina-Israel sendiri diawali dengan adanya Kesepakatan Prinsip yang ditandatangani tahun 1993 antara Israel dengan PLO, yang

merupakan entitas yang diakui secara internasional sebagai perwakilan resmi bangsa Palestina. Proses ini kemudian lebih dikenal sebagai Proses Oslo, merujuk pada lokasi perundingan antara Israel dan PLO. Proses negosiasi yang kemudian menghasilkan Kesepakatan Prinsip tersebut dilangsungkan secara rahasia dan jauh dari pandangan publik.²² Proses Oslo terus berlanjut hingga mengalami kegagalan dalam perundingan di Camp David tahun 2000. Proses perdamaian Palestina-Israel sendiri merupakan salah satu trek bilateral dalam Kesepakatan Madrid tahun 1991. Selain trek Palestina-Israel, negosiasi damai juga berlangsung antara Yordania-Israel dan Suriah-Israel. Namun, trek terakhir tidak berhasil mencapai sebuah kesepakatan sedangkan perdamaian Yordania dengan Israel dicapai tahun 1994. Keberhasilan Kesepakatan Madrid maupun Kesepakatan Prinsip tidak dapat dilepaskan dari peran mediasi Amerika Serikat.

Pasca penandatanganan kesepakatan yang mengakui eksistensi kedua pihak dalam Kesepakatan Prinsip, kesepakatan selanjutnya baru ditandatangani tahun 1994 dalam Kesepakatan Gaza-Yerikho yang mengatur mengenai pembentukan Otoritas Palestina. Setahun kemudian, Kesepakatan Oslo II ditandatangani sebagai sebuah ad interim agreement yang mengatur wilayah-wilayah Palestina dalam tiga tipe dimana wilayah A merupakan wilayah yang ada di bawah kontrol penuh Palestina sementara wilayah C berada di bawah kontrol penuh Israel dan wilayah B merupakan wilayah yang secara sipil dikendalikan oleh Palestina namun ada dalam pengawasan keamanan Israel. Pada tahun 1997, kedua pihak menandatangani Protokol Hebron yang dilanjutkan dengan Memorandum Wye River (1998) dan Memorandum Sharm El Sheikh (1999) yang semua membahas implementasi dari arsitektur Kesepakatan Oslo. Tahun

¹⁹ Lihat misalnya Daniele Camarani, Ed., *Comparative politics* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

²⁰ Lihat misalnya Jonathan Hopkin, “The comparative method,” dalam David Marsh dan Gerry Stoker, Eds., *Theory and methods in political science* (New York: Palgrave MacMillan, 2010), 285-307.

²¹ Lihat misalnya yang dilakukan oleh Yuen Foong Khong dalam menganalisis keputusan Amerika Serikat di Vietnam tahun 1965 dalam Yuen Foong Khong, *Analogies at war: Korea, Munich, Dien Bien Phu, and the Vietnam decisions of 1965* (Princeton: Princeton University Press, 1992).

²² Anthony Wanis-St. John, *Backchannel negotiation: secrecy in the Middle East peace process* (New York: Syracuse University Press, 2011).

2000, kedua pihak gagal mencapai kesepakatan di Perundingan Camp David dan setahun kemudian mereka kembali gagal mencapai kesepakatan dalam Perundingan Taba. Kegagalan Perundingan Camp David sering disebut menandai berakhirnya Proses Oslo.²³ Pasca Camp-David dan Taba, perundingan damai kedua pihak tidak lagi terjadi hingga tahun 2007 ketika Palestina dan Israel bertemu dalam Perundingan Annapolis. Pasca Annapolis, proses negosiasi diubah menjadi perundingan langsung antara Palestina dengan Israel yang berlangsung hingga berakhirnya pemerintahan Barack Obama di Amerika Serikat. Selama periode Proses Oslo, Amerika Serikat kembali menjadi mediator utama dalam proses perdamaian Palestina-Israel namun, pasca kegagalan Camp David, Kelompok Kuartet²⁴ menggantikan peran Amerika Serikat sebagai mediator proses perdamaian.

Proses Oslo sendiri dibangun dengan fokus pada empat pilar, atau sering dirujuk sebagai the four legs of table, yang meliputi: isu perbatasan, isu keamanan, isu pengungsi, dan isu Yerusalem. Dalam kenyataannya, Proses Oslo lebih banyak berfokus pada pembicaraan mengenai isu perbatasan dan keamanan dengan mengedepankan konsep land-for-peace (Israel menyerahkan wilayah

teritorial kepada Palestina dengan imbalan adanya jaminan keamanan). Semua perundingan yang dilakukan dalam Proses Oslo tidak pernah mampu mencapai kesepakatan final. Meski mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan final, terdapat beberapa kesepakatan sementara (ad interim). Model kesepakatan sementara ini merupakan pilihan yang masuk akal.²⁵ Kegagalan untuk mencapai kesepakatan tersebut sejalan dengan model berakhirnya negosiasi yang oleh Zartman disebut sebagai dueling, yang terjadi manakala kedua pihak sama-sama bersikeras memberikan konsesi yang memaksimalkan kepentingan mereka dan menunggu hingga ada satu pihak yang memutuskan untuk menerima konsensi. Salah satu karakteristik dueling adalah para pihak lebih memilih untuk melakukan tawar menawar pada poin-poin keamanan mereka dan bukan pada kemungkinan solusi kesepakatan.²⁶ Selain dueling, negosiasi bisa juga berakhir dengan driving atau dragging. Driving yang ditandai dengan adanya pergerakan ke arah kesepakatan meski jalannya lambat. Meski demikian, dalam situasi driving, kesepakatan baru akan tercapai jika kebutuhan keamanan telah terpenuhi. Sementara itu, dragging terjadi jika salah satu atau beberapa pihak dalam perundingan melihat bahwa konsesi yang dihasilkan tidak akan memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka memutuskan untuk mencari akhir yang landai.

Kegagalan Proses Oslo sebenarnya mempunyai sisi positif mengingat Proses Oslo tidak pernah meletakkan kedua pihak yang bertikai, Palestina dan Israel, dalam

²³ Perundingan Taba berakhir karena adanya pemilihan umum Israel. Perdana Menteri Israel saat itu, Ehud Barak, memutuskan menghentikan perundingan untuk persiapan pemilihan umum. Namun, setelah Barak kalah dalam pemilihan umum, Perdana Menteri Israel terpilih, Ariel Sharon, memutuskan untuk tidak melanjutkan perundingan. Perundingan Camp David sendiri mengalami kegagalan karena tingginya ketidakpercayaan (distrust) dan ketidaksepakatan (disagreement), terutama terkait dengan status Yerusalem.

²⁴ Kelompok Kuartet beranggotakan Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan Rusia. Meski demikian, Tocci menilai bahwa peran Kelompok Kuartet tidak efektif. Penilaian serupa diberikan oleh Elgindy. Nathalie Tocci, “The Middle East Quartet and (in)effective multilateralism,” *Middle East Journal* 67, No. 1 (2013): 29-44; Khaled Elgindy, *The Middle East Quartet: a post-mortem* (Washington, DC.: The Brookings Institution, 2012).

²⁵ Robert Malley dan Husein Agha, “Camp David: the tragedy of errors”, *The New York Review*, (9 Agustus 2001), <https://www.nybooks.com/articles/2001/08/09/camp-david-the-tragedy-of-errors/>, diakses pada 20 November 2020).

²⁶ I. William Zartman, “Introduction,” dalam *How negotiations end: Negotiating behavior in the endgame*, ed., I. William Zartman (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 5.

posisi yang seimbang.²⁷ Pasca Proses Oslo, upaya perdamaian Palestina-Israel tidak lagi didominasi oleh perundingan bilateral. Palestina menggunakan tiga strategi yang berbeda dalam upaya mendapatkan pengakuan kedaulatan.²⁸ Pertama, mereka menggunakan opsi jalur multilateral melalui PBB dan organ-organnya. Kedua, Palestina juga menggunakan jalur kekerasan yang tidak lagi didominasi oleh Hamas namun juga diisi oleh kelompok-kelompok sempalan Fatah yang tumbuh pasca intifadah kedua ataupun kelompok lain di luar Fatah/PLO dan Hamas.²⁹ Sebaliknya, kekuatan diplomatik dan politik Hamas juga semakin meningkat pasca penarikan mundur Israel dari Jalur Gaza tahun 2004 sehingga memberikan pertimbangan kekuatan politik sebagai representasi Palestina.³⁰ Ketiga, proses negosiasi tetap dibuka meski lebih berperan sebagai sarana untuk mengamankan aliran pendanaan dan bukan dilakukan untuk

secara serius mencari kata sepakat (final agreement).³¹ Di sisi Israel, proses perdamaian tidak lagi menjadi jargon politik yang efektif untuk mendulang suara seiring dengan semakin meningkatnya jumlah imigran (alimah) yang menghadirkan kekuatan politik baru.

Ada beberapa catatan mengenai alasan bagi kegagalan proses perdamaian Palestina-Israel dalam Proses Oslo. Pundak menjelaskan bahwa problem mendasar dalam kegagalan Proses Oslo ada pada kesalahan manajemen dan bukan hanya minimnya keinginan kedua pihak yang bertikai untuk mencapai kata sepakat.³² Dalam banyak kasus, kesepakatan yang telah dihasilkan tidak dijalankan dengan baik sehingga perundingan selanjutnya masih kembali membahas masalah yang sama. Hal ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh para akademisi bahwa keberhasilan negosiasi membutuhkan keberhasilan di tiga fase yang berbeda, yaitu: pre-negosiasi, fase utama negosiasi, dan implementasi kesepakatan dan bukan hanya di keberhasilan di fase pertama dan/atau kedua saja.³³ Selama Proses Oslo, misalnya, ada beberapa butir kesepakatan yang kembali diperdebatkan dan kemudian disepakati kembali karena ada masalah dalam implementasinya. Kesepakatan mengenai penarikan mundur Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza yang dijanjikan dalam Kesepakatan Oslo dijalankan secara lambat. Israel, misalnya, menarik diri dari sebagian wilayah Yerikho pasca kesepakatan Gaza-Yerikho dan dari Hebron pasca kesepakatan Hebron, namun tidak secara tuntas.³⁴

²⁷ Edward Said, *The end of the peace process: Oslo and after* (New York: Vintage, 2001).

²⁸ Broto Wardoyo, “Indonesia, DK, dan Palestina”, *Kompas*, 20 Juni 2018. <https://www-beta.kompas.id/baca/opini/2018/06/20/indonesia-dk-dan-palestina/>, diakses pada 20 November 2020.

²⁹ Arafat menjadi salah satu sosok yang secara tidak langsung mendorong radikalisme tersebut. Arafat tidak memiliki strategi yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan dalam menghadapi dilema pasca kegagalan Camp David dan provokasi Ariel Sharon. Akibatnya, opsi-opsi politik Arafat, termasuk “membiarkan” kelompok muda Fatah untuk melakukan resistensi bersenjata, dilakukan dengan pertimbangan jangka pendek. Yezid Sayigh, “Arafat and the anatomy of revolt,” *Survival* 43, No. 3 (2001): 47-60.

³⁰ Hamas mengalami proses transformasi yang meski tetap mempertahankan ideologi radikal namun memberikan ruang bagi beberapa pemimpinnya untuk menyuarakan pandangan yang lebih moderat. Hal ini nampak dalam opsi-opsi politik Hamas di Palestina dan dalam pernyataan-pernyataan diplomatik Hamas ketika mereka berkuasa. Jeroen Gunning, “Peace with Hamas? The transforming potential of political participation,” *International Affairs* 80, No. 2 (2004): 233-255; Menachem Klein, “Hamas in power,” *Middle East Journal* 61, No. 3 (2007): 442-459; Broto Wardoyo, “Pemerintahan Hamas dan Prospek Perdamaian,” *Global: Jurnal Politik Internasional* 8, No. 2 (2006): 79-90.

³¹ Scott Lasensky, “Paying for peace: the Oslo Process and the limits of American foreign aid,” *Middle East Journal* 58, No. 2 (2004): 210-234; Chris Wake, “An unaided peace? The (unitended) consequences of international aid on the Oslo peace process,” *Conflict, Security and Development* 8, No. 1 (2008): 109-131.

³² Ron Pundak, “From Oslo to Taba: what went wrong?” *Survival* 43, No. 3 (2001): 31-45.

³³ G.R. Berridge, *Diplomacy: theory and practice*, (London: Palgrave Macmillan, 2010), Part I.

³⁴ Edward W. Said, “The real meaning of the Hebron agreement,” *Journal of Palestine Studies* 23, No. 3 (1997): 31-36; Kirsten E. Schulze, “The Hebron

Penarikan diri dari Jalur Gaza bahkan baru selesai tahun 2004 dan dilakukan secara sepihak tidak dalam kerangka Proses Oslo. Amerika Serikat yang menjadi mediator tidak secara tegas memberikan tekanan pada para pihak yang bersepakat untuk menjalankan butir-butir kesepakatan yang telah dicapai.

Kegagalan atau keberhasilan negosiasi juga terkait dengan detail proposal atau usulan perdamaian itu sendiri. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam Proses Oslo lebih banyak membahas mengenai dua pilar pertama, perbatasan dan keamanan, dan cenderung meninggalkan dua pilar terakhir, pengungsi dan status Yerusalem. Padahal, kedua terakhir tersebut cenderung lebih sulit untuk ditangani mengingat karakter non-materialistiknya yang kuat. Perdebatan mengenai definisi pengungsi Palestina tidak kunjung selesai hingga saat ini dan, sebagai dampak, penghitungan jumlah, dan kompensasi serta solusi-solusinya pun menjadi tidak jelas.³⁵ Per 31 Desember 2019, UNRWA mencatat lebih dari 5,6 juta jiwa berhak menyandang status pengungsi dan mendapatkan perhatian dari lembaga tersebut.³⁶ Pada awal pembentukannya di tahun 1949, UNRWA mencatat jumlah pengungsi Palestina baru mencapai 750 ribu hingga 1 juta jiwa.³⁷ Artinya dalam periode hampir tujuh dekade, jumlah pengungsi yang dicatat oleh UNRWA meningkat hingga 5 kali lipat. Selain itu, terkait Yerusalem, tidak nampak ada penyelesaian yang hakiki yang diusulkan dalam proposal kesepakatan abad ini. Isu Yerusalem sendiri lebih pelik

dibandingkan dengan isu-isu lain dalam proses perdamaian karena memiliki persinggungan dengan identitas.³⁸

Pilihan untuk tidak membahas masalah pengungsi maupun Yerusalem tersebut akan berdampak pada tidak adanya keputusan final proses perdamaian. Usulan ini berbeda, misalnya, dengan dua proposal perdamaian yang dianggap paling “fair” dalam sejarah proses perdamaian: Geneva Accord/Initiative dan Clinton Parameters. Di dalam kedua proposal tersebut dijelaskan secara detail mengenai kesepakatan-kesepakatan yang seharusnya dicapai terkait isu pengungsi dan Yerusalem. Hanya saja ada dua kelemahan mendasar dari Geneva Accord/Initiative dan Clinton Parameters. Proposal pertama sifatnya unofficial. Kesepakatan tersebut merupakan hasil perundingan bottom-up yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah.³⁹ Sementara itu, proposal kedua diusulkan hanya dalam satu pertemuan dengan tenggat waktu penerimaan yang singkat dan memiliki karakter take it or leave it tanpa memberikan kesempatan untuk dinegosiasikan. Clinton Parameters diusulkan oleh Presiden Bill Clinton pasca kegagalan pertemuan di Camp David. Hanya saja, usulan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya masa jabatan Clinton sebagai Presiden sehingga tidak sempat secara serius dibicarakan di meja perundingan.⁴⁰

Berkaca dari kesepakatan-kesepakatan maupun proposal-proposal tersebut, “kesepakatan abad ini” harus diletakkan

agreement,” *The Mediterranean Politics* 2, No. 1 (1997): 201-205.

³⁵ Susan Akram, “UNRWA and Palestinian refugees,” dalam *The Oxford handbook of refugee and forced migration studies*, eds., Elena Fiddian-Qasmieh, Gil Loescher, Katy Long, dan Nando Sigona, (Oxford: Oxford University Press, 2014), 227-240.

³⁶ “UNRWA in Figures”, UNRWA, diakses 27 Januari 2021, https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2020_eng_v2_final.pdf.

³⁷ “Who We Are”, UNRWA, diakses 27 Januari 2021, <https://www.unrwa.org/who-we-are>.

³⁸ Simon Sebag Montefiore, *Jerusalem: the biography* (New York: Alfred A. Knopf, 2011).

³⁹ Menachem Klein, *A possible peace between Israel and Palestine: an insider account of the Geneva Initiative* (New York: Columbia University Press, 2007).

⁴⁰ Clinton Parameters sendiri dibangun dengan premis adanya wilayah Palestina yang terhubung (continuous) dan batas yang digunakan sebagai patokan adalah batas 1967 dengan modifikasi yang minimal. Dua premis tersebut memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi Palestina dan mendapatkan penolakan dari Israel. Gershon Hachoen, “A two state solution? Just not according to Clinton Parameters,” *BESA Center Perspective Paper*, No. 401 (30 Januari 2017).

dalam konteks proposal tersebut bukan merupakan solusi final yang non-negotiable. Artinya, proposal tersebut harus dijadikan titik awal negosiasi dan bukan sesuatu yang siap diimplementasikan seperti yang dikehendaki oleh Presiden Trump. Dalam tulisan ini, dengan melihat pada pada kajian mengenai proposal-proposal terdahulu, ada dua variabel yang perlu dilihat untuk menilai dampak dari “kesepakatan abad ini” bagi proses perdamaian Palestina-Israel, yaitu: variabel konstelasi politik domestik di Israel dan Palestina serta posisi Amerika Serikat dalam memahami proses perdamaian Palestina-Israel.⁴¹ Kedua variabel tersebut menentukan apakah detail dan arah proposal perdamaian akan bisa diterima dan diimplementasikan dengan baik atau tidak.

Konstelasi Politik Domestik dan “Kesepakatan Abad Ini”

Penilaian terhadap proposal “kesepakatan abad ini” harus dibuat dengan meletakkan proposal tersebut dalam konteks politik domestik di Israel dan Palestina. Politik di Israel pasca Ehud Barak didominasi oleh partai-partai sayap kanan.⁴²

⁴¹ Hal ini juga sejalan dengan penilaian Sher dan Duckett bahwa berhasil atau tidaknya proses perundingan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: pengaruh dan tekanan Amerika Serikat, situasi politik domestik di Israel, serangan teror terhadap Israel dari kelompok-kelompok perlawanan Palestina, dan rasa nyaman terhadap kondisi status quo. Lihat Gilead Sher dan Adelaide Duckett, “Israel's peacemaking under security challenges: Implications of a retrospective outlook,” *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* 43, No. 3 (2020): 41-57.

⁴² Spektrum politik Israel bisa dibedakan ke dalam kelompok kanan atau nasionalis, religius, tengah, dan kiri. Sebagian besar partai utama seperti Likud, Kadima, maupun Buruh bergerak ke tengah meski tetap memiliki nuansa kanan (Likud dan Kadima) maupun kiri (Buruh). Belakangan, beberapa partai baru mengambil segmen pemilih sayap ultra-kanan (ekstrim kanan) terutama mereka yang merupakan imigran baru dari Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet. Partai-partai religius (misalnya partai Shas) secara konsisten menekankan pada keistimewaan keyahudian.

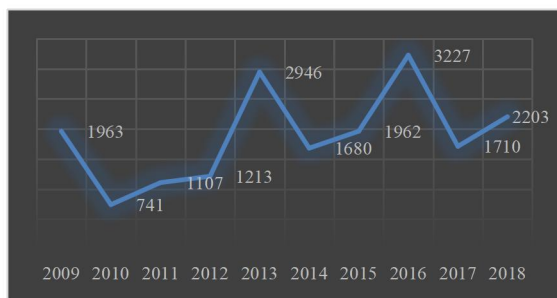
Pengganti Barak, Ariel Sharon, berasal dari Partai Likud, sebelum kemudian dia mendirikan Partai Kadima. Kadima sendiri dibentuk oleh Sharon untuk memuluskan langkah penarikan mundur Israel dari Jalur Gaza (disengagement plan) yang oleh Sharon dianggap menjadi kunci untuk meminimalkan ancaman kekerasan terhadap Israel oleh kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang berbasis di wilayah Jalur Gaza.⁴³ Pengganti Sharon, Ehud Olmert, berasal dari Partai Kadima. Meski Sharon dikenal sebagai tokoh sayap kanan, Kadima sendiri memiliki platform politik tengah. Pasca Olmert, pemerintahan dipimpin oleh Benjamin Netanyahu yang berasal dari Partai Likud yang sayap kanan dan cenderung anti-perdamaian. Pemerintahan Netanyahu dibentuk dengan berkoalisi dengan partai ultra-kanan (Yisrael Beiteinu) yang anti-perdamaian dan partai religius-kanan (Habayit Hayehudi) yang juga anti-negosiasi.⁴⁴ Selama berkuasa, beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Netanyahu berseberangan dengan semangat perdamaian.

Salah satu kebijakan Netanyahu yang banyak dikritik dan berkontribusi negatif pada proses perdamaian adalah kebijakan untuk melakukan pembangunan pemukiman Yahudi. Lebih buruk lagi, pembangunan pemukiman tersebut juga dilakukan di wilayah-wilayah yang dipersengketakan,

⁴³ Perlu diingat bahwa penarikan diri dari Gaza merupakan mandat kesepakatan Gaza-Yerikho tahun 1994. Meski demikian, penarikan diri yang dilakukan Sharon tahun 2004 tidak terkait dengan kesepakatan tersebut mengingat Proses Oslo praktis sudah tidak digunakan sebagai dasar dalam hubungan Palestina dengan Israel sejak kegagalan Camp David tahun 2000.

⁴⁴ Koalisi ini berakhir pada 2019 setelah pemilihan umum Israel. Pasca pemilihan umum tersebut, Likud berkoalisi dengan Kahol Lavan yang dipimpin Benny Gantz yang berhaluan tengah. Kahol Lavan sendiri adalah gabungan dari beberapa partai. Koalisi tersebut memungkinkan Netanyahu tetap menjadi Perdana Menteri, namun kesepakatan politik yang dibuat akan membuat Gantz menduduki posisi tersebut mulai bulan November 2021 menggantikan Netanyahu.

seperti di Yerusalem Timur. Data yang dirilis oleh Peace Now memperlihatkan bahwa rata-rata pemerintah Israel di masa kepemimpinan Netanyahu membangun hampir 1800 pemukiman baru per tahun dan 42% persen pembangunan tersebut dilakukan di wilayah Yerusalem Timur yang notabene merupakan wilayah sengketa dan di wilayah-wilayah lain yang diperuntukkan bagi Palestina berdasarkan Kesepakatan Prinsip.⁴⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Netanyahu secara terstruktur menggunakan kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi sebagai sarana okupasi yang efektif (effective occupation) di wilayah sengketa. Kebijakan effective occupation tersebut akan mengubah komposisi demografi di wilayah sengketa dan akan memungkinkan Israel untuk mencaplok wilayah-wilayah yang disengketakan sebagai bagian dari wilayahnya dalam proses perundingan.

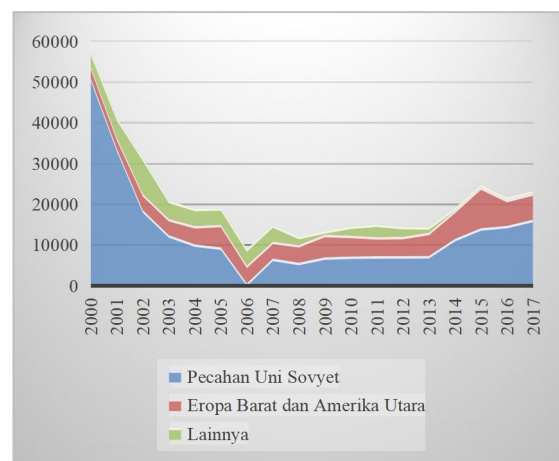


Grafik 1. Pembangunan pemukiman Yahudi (Sumber: Peace Now, 2020)

Kebijakan yang diambil oleh Netanyahu tersebut sejalan dengan platform partai-partai koalisi pemerintahannya yang sebagian besar menyandarkan dukungan politik pada kehadiran para imigran baru (alياهو). Para imigran ini merupakan pendukung politik utama partai-partai ultra-kanan. Peran para imigran ini dalam mengubah peta politik Israel nampak dengan kuat pasca kegagalan perundingan Camp David. Khanin mengkaitkan adanya

⁴⁵ “Settlement Watch”, Peace Now, diakses 20 November 2020, <https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/construction>.

pergeseran peta politik Israel dari dominasi partai-partai kiri-tengah ke partai-partai kanan di periode 2000-an yang salah satunya didorong oleh kehadiran para imigran dari negara-negara pecahan Uni Soviet yang ingin memiliki akses terhadap pengambilan kebijakan.⁴⁶ Kelompok imigran tersebut memiliki kongruensi agenda politik dengan partai-partai ultra-nasionalis ataupun religius yang mendorong hak-hak khusus bagi kelompok Yahudi. Selama periode 2000-2017, berdasarkan data dari Israel Central Bureau of Statistics (CBS) jumlah imigran dari negara-negara pecahan Uni Soviet mencapai lebih dari 36% dari jumlah imigran Yahudi yang masuk ke Israel.⁴⁷



Grafik 2. Jumlah alياهو ke Israel (Sumber: CBS Israel, 2020)

Dengan peta politik yang seperti itu, sulit untuk membayangkan bahwa pemerintah yang berkuasa di Israel akan membuka diri terhadap upaya negosiasi. Negosiasi tidak lagi menjadi komoditas politik yang seksi untuk mendulang dukungan politik domestik. Dalam pemilihan

⁴⁶ Vladimir (Ze’ev) Khanin, “Russian-Jewish political experience in Israel: patterns, elites and movements,” *Israel Affairs* 17, No. 1 (2011): 55-71; Ian S. Lustick, “Israel’s migration balance: demography, politics, and ideology,” *Israel Studies Review* 26, No. 1 (2011): 33-65.

⁴⁷ Central Bureau of Statistics Israel, diakses 16 Oktober 2020, https://www.gov.il/en/departments/central_bureau_of_statistics.

umum tahun 2019, misalnya, Netanyahu secara tegas menolak usulan apapun untuk bernegosiasi ataupun membuka kembali proses perdamaian. Netanyahu tetap menempatkan isu keamanan sebagai salah satu tema kampanye dengan tanpa mempertimbangkan negosiasi ataupun perdamaian sebagai solusi bagi masalah keamanan yang dihadapi oleh Israel. Selama periode Proses Oslo, isu keamanan Israel menjadi agenda utama dalam proses perdamaian. Apalagi, muncul pergeseran persepsi ancaman Israel dari semula berasal dari kelompok-kelompok radikal Palestina, seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina, ke Iran yang membuat memperkuat argumentasi Netanyahu untuk tidak mengkaitkan isu keamanan dengan perdamaian. Bahkan, kandidat Perdana Menteri yang berasal kelompok tengah seperti Benny Gantz juga tidak mempromosikan proses negosiasi, ataupun solusi dua negara, dalam opsi separasi yang dia usulkan untuk mengatasi masalah keamanan Israel.

Peta politik di Palestina juga tidak terlalu menguntungkan bagi proses negosiasi ataupun proses perdamaian. Survei yang dilakukan Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) memperlihatkan bahwa dukungan terhadap solusi dua negara di publik Palestina juga cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meski tren yang kurang lebih sama juga terjadi di publik Israel, angka dukungan publik Israel tersebut tidak serendah dukungan publik Palestina. Hasil survey PSR bulan Desember 2020 memperlihatkan bahwa dukungan publik Palestina terhadap solusi dua negara hanya tinggal 40%, atau turun dari dukungan sebesar 71% di tahun 2006.⁴⁸ Shikaki dan Scheindlin mengidentifikasi tiga alasan bagi penurunan dukungan terhadap solusi dua negara tersebut, yaitu: menguatnya kelompok

religijs (baik di publik Palestina maupun Israel) dan kelompok nasionalis sayap kanan, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pihak lawan, dan menguatnya keyakinan bahwa solusi dua negara tidak lagi feasible karena perkembangan-perkembangan di lapangan.⁴⁹

Salah satu temuan yang menarik dari survei PSR bulan September 2018 adalah tingkat kepercayaan publik Palestina terhadap dua kelompok utama Palestina, Hamas dan Fatah, yang juga mengalami penurunan. Publik Palestina nampaknya sudah mulai lelah dengan pertarungan antara kedua kelompok tersebut. Pertarungan antara Hamas dan Fatah menjadi masalah klasik dalam persatuan Palestina. Pertarungan tersebut nampak lebih dominan dibanding ketidaksukaan mereka kepada Israel. Selama Proses Oslo, Hamas selalu mengganggu kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani oleh PLO, dimana Fatah merupakan kekuatan utamanya. Langkah Hamas ini dikenal sebagai strategi outbidding dimana sikap antipati terhadap kesepakatan digunakan untuk mendapatkan dukungan publik yang tidak menyetujui isi kesepakatan.⁵⁰ Perilaku tersebut membuat PLO harus senantiasa mempertimbangkan penolakan Hamas dalam keputusan mereka untuk membuat kesepakatan dengan Israel. Perilaku yang sama juga ditunjukkan oleh Fatah ketika mereka menolak kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, dikenal sebagai tahdia, tahun 2008. Tahdia sendiri menjadi tanda terjadinya perubahan posisi Hamas terhadap Israel.⁵¹ Apalagi,

⁴⁸ “Public opinion poll No. 78,” PSR (15 Desember 2020), diakses 27 Februari 2021, <https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll%2078%20English%20fulltext%20December%202020.pdf>.

⁴⁹ Khalil Shikaki dan Dahlia Scheindlin, *The role of public opinion in the resilience/resolution of the Palestinian-Israeli conflict* (Ramallah: PSR, 2018), <https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Final%20policy%20report%20English%20Jan2019.pdf>, diakses 20 November 2020.

⁵⁰ Andrew Kydd dan Barbara L. Walter, “Sabotaging the peace: the politics of extremist violence,” *International Organization* 56, No. 2 (2002): 263-296.

⁵¹ Fawaz A. Gerges, “The transformation of Hamas,” *The Nation*, (25 Januari 2010), <https://www.thenation.com/article/transformation-hamas/>, diakses 20 November 2020.

keputusan tahdia diambil pasca keterlibatan Hamas dalam proses pemilihan umum Palestina. Transformasi Hamas membuka kesempatan bagi pelibatan Hamas dalam proses negosiasi atau proses perdamaian. Hanya saja, upaya melibatkan Hamas dalam negosiasi damai terganjal oleh penolakan Fatah dan keengganan Hamas untuk masuk ke PLO.⁵²

Transformasi Hamas tersebut tidak dengan serta merta mengubah opsi perjuangan mereka. Secara konsisten, Hamas tetap melakukan serangan-serangan ke Israel. Hanya saja, pasca intifadah kedua, serangan terhadap Israel tidak hanya dilakukan oleh Hamas namun juga Brigade Al-Aqsa, sayap militer Fatah yang terbentuk sejak intifadah kedua.⁵³ Serangan-serangan tersebut seringkali memunculkan lingkaran kekerasan, meski menurut Abrahams, et.al., siklus tersebut sebenarnya cenderung berlangsung singkat dan memiliki jeda waktu tenang yang cukup panjang.⁵⁴ Metode utama serangan Hamas adalah serangan roket.⁵⁵ Sementara itu, metode utama yang digunakan oleh Brigade Al-Aqsa lebih pada popular terror attacks atau popular resistances. Selain itu area kerja kedua kelompok tersebut juga

berbeda, dimana sebagian besar aktivitas Hamas berlangsung di Gaza dan sebagian besar aktivitas Brigade Al-Aqsa di Tepi Barat. Di luar perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat pola kerja yang relatif sama antara Hamas dan Fatah yang sama-sama bergerak di jalur kekerasan dan politik secara bersamaan. Dengan kata lain, variasi opsi kerja ini memperlihatkan ada variasi intra-kelompok yang ditandai dengan hadirnya kekuatan moderat dan radikal di masing-masing kubu. Hal ini membuka celah bagi adanya kompromi politik di antara kelompok moderat di kedua kubu yang dapat berimplikasi pada hadirnya kepemimpinan persatuan seperti yang dikehendaki publik Palestina. Problem utamanya adalah melakukan pemetaan di dalam masing-masing kubu untuk menemukan tokoh-tokoh kunci moderat di dalam tubuh Hamas dan Fatah.

Situasi politik di Israel dan Palestina tersebut sama-sama tidak menguntungkan bagi perkembangan proses perdamaian. Politik Israel sejak periode Sharon cenderung mengarah ke kanan atau nasionalis-relijius sedangkan politik Palestina cenderung cair dengan pertentangan yang tajam antara Hamas dan Fatah. Sementara itu juga ada tren melemahnya dukungan publik di kedua negara pada proses perdamaian yang memunculkan pesimisme terhadap hadirnya proposal damai apapun di saat ini, apalagi dengan kondisi proposal “kesepakatan abad ini” Amerika Serikat yang dianggap lebih berpihak pada Israel.

Problem “An Honest Broker”

Dominasi peran Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel tidak dapat dibantah. Peran tersebut nampak kuat dalam Proses Oslo. Pasca Camp David, Presiden George Walker Bush tidak memberikan perhatian pada proses perdamaian Palestina-Israel dan memindahkan fokus kebijakannya pada situasi di Irak. Presiden Barack Obama juga

⁵² Tahun 1996, PLO mengubah piagam mereka dengan menghapus pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan Kesepakatan Prinsip. Salah satunya adalah pasal mengenai penggunaan instrumen kekerasan terhadap Israel. Hamas tidak bersedia meninggalkan penggunaan instrumen kekerasan dan membuat kelompok tersebut tidak dapat bergabung ke dalam PLO.

⁵³ Alexei Abrahams, “Monopolization of violence in the Palestinian struggle,” *Defence and Peace Economics* 31, No. 8 (2020): 892-903.

⁵⁴ Alexei Abrahams, et.al., *Not a cycle of violence: an episodic analysis of Israel-Gaza conflict*, (Februari 2018),

https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/eklor/files/cycles_february_2018.pdf, diakses pada 20 November 2020; Alexei Abrahams, et.al, *Mostly deterred: an episodic analysis of Israel-Gaza conflict*, (Oktober 2019),

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465438, diakses 20 November 2020.

⁵⁵ Metode ini juga digunakan oleh Jihad Islam Palestina.

lebih dikenal dengan Asia pivot dan mengurangi fokus perhatian Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah, termasuk isu Palestina-Israel. Presiden Trump, berbeda dengan dua pendahulunya, memberikan perhatian pada eksistensi Israel di Timur Tengah.

Amerika Serikat sama-sama memberikan bantuan pada Israel dan Palestina. Dalam bidang non-militer, dukungan pendanaan Amerika Serikat ke Palestina jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pada Israel, dengan pengecualian periode 2017 hingga berakhirnya pemerintahan Trump.⁵⁶ Namun, jumlah bantuan total, militer dan non-militer, ke Israel jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah bantuan total Amerika Serikat ke Palestina. Dukungan pendanaan Amerika Serikat ke Palestina juga terus mengalami penurunan sejak 2014 hingga 2017. Tahun 2014, dukungan dana dari Amerika Serikat untuk Palestina mencapai 261 juta USD sedangkan tahun 2017 hanya 61 juta USD meski kemudian kembali meningkat menjadi 250 juta USD di tahun 2018.⁵⁷ Sebaliknya, bantuan ekonomi Amerika Serikat terhadap Israel mengalami peningkatan dari 2016 ke 2017 dari 13,3 juta USD menjadi 50,2 juta USD meski di tahun 2018 kembali turun ke angka 10,8 juta USD.⁵⁸

Dukungan pendanaan dari Amerika Serikat sendiri hanyalah bagian kecil dari dukungan pendanaan asing bagi Palestina. Perekonomian Palestina sangat ditopang oleh adanya bantuan asing.⁵⁹ Palestina juga menerima dana pajak yang pengumpulannya

dilakukan oleh Israel. Pendapatan pajak ini merupakan kontributor utama bagi pendanaan Palestina kemudian disusul oleh bantuan asing. Data tahun 2019, misalnya, memperlihatkan bahwa dari 3.975 juta USD kebutuhan anggaran Palestina, 3.175 juta USD didapatkan dari penghasilan pajak.⁶⁰ Problem ekonomi menjadi masalah yang serius bagi Palestina, dan juga dalam proses perdamaian, mengingat masih kuat ketergantungan ekonomi Palestina atas Israel. Dengan masih besarnya ketergantungan ekonomi, terutama pengumpulan pajak, dari Israel, posisi tawar Palestina dalam proses negosiasi perdamaian menjadi lemah. Dalam konteks tersebut, dukungan dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan posisi tawar kedua pihak dalam negosiasi menjadi penting. Namun, dalam proposal “kesepakatan abad ini”, tidak nampak adanya tawaran yang serius dari Amerika Serikat dalam poin ini. Justru sebaliknya, poin pengembangan ekonomi Palestina dalam kesepakatan abad ini justru dijadikan tawaran bagi kesepakatan politik.⁶¹

Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan kontribusi terhadap Palestina melalui pendanaan untuk UNRWA. Total kontribusi Amerika Serikat bagi pendanaan UNRWA dari tahun 1950 hingga 2018 mencapai 6.248,8 juta USD.⁶² Meski demikian, jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan total bantuan Amerika Serikat untuk Israel dari tahun 2008 hingga 2017 hanyalah seperlimanya.

⁵⁶ Amerika Serikat sendiri tidak memberikan dukungan pendanaan untuk bidang militer bagi Palestina.

⁵⁷ Jim Zanotti, “US foreign aid to the Palestinians,” CRS Report, 12 Desember 2018, 2.

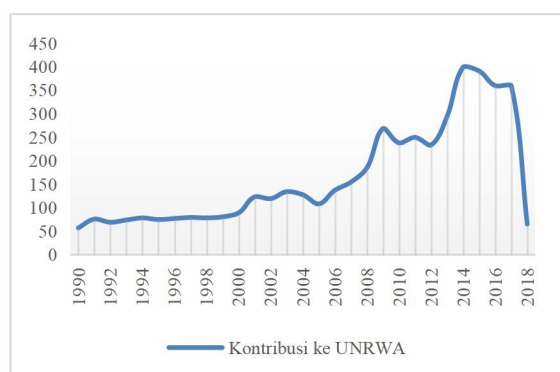
⁵⁸ Jeremy M Sharp, “US foreign aid to Israel”, 41.

⁵⁹ Dalam banyak kasus, dukungan pendanaan asing tersebut sifatnya kondisional, misalnya dikaitkan dengan adanya transparansi dalam pengelolaan. Tamer Qarmout and Daniel Béland, “The politics of the international aid to the Gaza Strip,” *Journal of Palestine Studies* 41, No. 4 (2012): 32-47.

⁶⁰ <http://www.pmf.ps/pmf/en/index.php>, diakses 20 November 2020. Untuk tahun 2019 dari <http://www.pmf.ps/pmf/documents/accounts/annual/2019/GFS-2019-en.pdf>, diakses 20 November 2020.

⁶¹ Salah satu poin penting dari proposal tersebut ada pada bagian Economic Framework. Salah satu yang sering digaungkan oleh pemerintahan Trump adalah masuknya investasi 50 milyar USD ke Palestina. Meski demikian, kerangka ekonomi tersebut sifatnya kondisional, artinya hanya jika kerangka politiknya disepakati. Bagian Political Framework tersebut yang menjadi ganjalan mengingat berbagai klausul yang dimasukkan ke dalam proposal tersebut mengurangi secara drastis wilayah dan kedaulatan Palestina.

⁶² Jim Zanotti, “US foreign aid to the Palestinians”, 6.



Grafik 3. Kontribusi AS ke UNRWA (dalam juta USD)
(Sumber: Zanotti, 2018)

Postur bantuan pendanaan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Palestina tersebut terlihat sangat timpang. Rata-rata dukungan pendanaan Amerika Serikat ke Israel dari 1993 hingga 2017 mencapai lebih dari 1.200 juta USD.⁶³ Angka tersebut jauh di atas bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Palestina. Bantuan Amerika Serikat ke Israel sendiri didominasi oleh bantuan militer, termasuk bagi pengembangan sistem persenjataan. Selain bantuan militer, keterikatan Amerika Serikat dengan Israel juga nampak dari adanya pendanaan dari Amerika Serikat untuk pembangunan pemukiman Yahudi di Israel. Periode kepemimpinan Presiden Trump mencatat puncak dukungan finansial AS untuk pembangunan pemukiman Yahudi. Tahun 2017, dukungan pendanaan bagi pembangunan pemukiman Yahudi mencapai 459 juta USD yang merupakan angka terbesar dalam 15 tahun terakhir. Angka terendah adalah tahun 2009, hanya sekitar 210 juta USD, ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Obama.⁶⁴ Hal ini sekaligus memperlihatkan perbedaan dukungan antara kedua Presiden tersebut

⁶³ Jeremy M Sharp, “US foreign aid to Israel”, 2.

⁶⁴ “Israeli Settlements Funding Jumped since Trump: Official Data”, Al Jazeera, (15 Mei 2019), <https://www.aljazeera.com/news/2019/5/15/israeli-settlements-funding-jumped-since-trump-official-data>, diakses 20 November 2020.

pada Israel. Meski demikian, problem mendasar dalam masalah dukungan pendanaan tersebut ada pada status sumber pendanaan yang tidak selalu berasal dari lembaga resmi pemerintah. Blau and Federman menemukan adanya beberapa keluarga kaya di Amerika Serikat yang memberikan dukungan pada kelompok-kelompok sayap kanan dan tidak segan untuk menggelontorkan dana bagi pembangunan pemukiman Yahudi, seperti misalnya keluarga Falic.⁶⁵

Profil finansial tersebut memperlihatkan ketimpangan komitmen dukungan dan kedekatan antara Amerika Serikat dengan Israel dan Amerika Serikat dengan Palestina. Hanya saja, problem terbesar dalam mediasi Amerika Serikat adalah isu “an honest broker”. Isu ini terkait dengan kuatnya lobi Yahudi di politik Amerika Serikat dan berkulminasi pada bangunan konsep Israel first.⁶⁶ Kuatnya lobi Yahudi tersebut berkontribusi pada berbagai permasalahan yang dihadapi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Lobi yang sama membuat Amerika Serikat tidak mampu mendefinisikan kepentingannya di kawasan dengan cermat. Upaya untuk melemahkan lobi Yahudi tersebut akan terjadi jika muncul kompetitor. Menurut Badie, kompetisi terhadap lobi Yahudi sudah mulai menguat dengan munculnya J-Street yang mengimbangi peran AIPAC.⁶⁷ Muncul

⁶⁵ Uri Blau dan Josef Federman, “US duty free magnates fund controversial Israeli settlements,” AP News, (2 Juli 2019), <https://apnews.com/article/87e58e1f3779432fb353bb786794c6b7>, diakses 20 November 2020.

⁶⁶ John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, *The Israel lobby and US foreign policy*; James Petras, *The power of Israel in the United States* (Atlanta: Clarity Press, 2006).

⁶⁷ Dina Badie, “How AIPAC could lose its bipartisan status” *The Conversation*, (14 Maret 2019), <http://theconversation.com/how-aipac-could-lose-its-bipartisan-status-113241>, diakses 20 November 2020. Meski demikian, J-Street sendiri tetap pro terhadap Israel dengan tetap melihat solusi dua negara sebagai pilar utama bagi berdirinya negara Israel. Lihat laman

dan menguatnya lobi J-Street mendorong pergeseran AIPAC yang selama beberapa dekade cenderung bipartisan menjadi pro-Republican. Hal ini karena J-Street memilih untuk mendukung partai Demokrat mengingat rekam jejak mereka yang cenderung pro terhadap proses perdamaian.

Langkah-langkah Presiden Trump dalam kebijakan-kebijakan di Timur Tengah dan terkait dengan Israel ditandai dengan dukungan yang kuat pada mitra aliansi utamanya tersebut. Dalam kerangka tersebut, kekhawatiran bahwa “kesepakatan abad ini” hanya akan menguntungkan Israel dan merugikan Palestina—dan hanya menegaskan posisinya sebagai “a dishonest broker”—menjadi sangat wajar.

Penutup

Dari uraian di atas, ada beberapa catatan bagi kebijakan Indonesia. Pertama, “kesepakatan abad ini” tidak cukup komprehensif jika dibandingkan dengan proposal-proposal perdamaian lain, terutama karena proposal tersebut tidak membahas isu pengungsi maupun Yerusalem. Padahal, kedua isu tersebut merupakan isu yang pelik dan membutuhkan pembahasan tersendiri. Selain itu, fokus proposal “kesepakatan abad ini” lebih diletakkan pada kerangka politik yang pro-Israel dengan menggunakan tawaran perbaikan ekonomi sebagai pemicat. Tidak ada ruang bagi negosiasi di dalam kesepakatan abad ini seperti dalam upaya membangun kesepakatan-kesepakatan terdahulu. Kedua, situasi politik di Israel dan Palestina tidak menguntungkan bagi dibukanya proses negosiasi/perdamaian. Di Israel, kekuatan dominan dipegang oleh kekuatan sayap kanan-religius yang cenderung tidak pro perdamaian. Di Palestina, pertarungan antara Hamas dan Fatah masih tetap ada meski transformasi di kedua kubu memunculkan potensi lahirnya aliansi para moderat. Dukungan publik bagi

proses negosiasi berbasis solusi-dua-negara sendiri juga melemah. Ketiga, problem “an honest broker” masih tetap muncul dimana sikap Amerika Serikat tidak menunjukkan perubahan akan adanya niat yang kuat untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel secara fair. Kesepakatan abad ini seharusnya diletakkan dalam konteks absennya proses negosiasi/perdamaian pasca Camp David. Dari titik ini, “kesepakatan abad ini” tidak dapat diperlakukan sebagai final agreement.

Selain itu, problem utama dalam Proses Oslo muncul dalam detail-detail kesepakatan. Model pemaksaan kesepakatan, yang ditekankan dalam kesepakatan abad ini, bisa menjadi opsi agar kedua pihak berunding secara serius dalam detail-detail kesepakatan. Hanya saja, proses tersebut tidak akan mudah. Perlu dicatat, bahwa Netanyahu sekalipun pernah berhasil dipaksa untuk menyepakati memorandum Wye River tahun 1998. Pemaksaan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen ekonomi mengingat kedua pihak sama-sama memiliki ketergantungan—meski dalam derajat yang berbeda—terhadap bantuan dari Amerika Serikat. Hanya saja, diperlukan komitmen yang kuat untuk mendorong para pihak yang bertikai agar bersedia duduk bersama dan memulai kembali proses negosiasi. Perlu dicatat bahwa Palestina sendiri terlihat semakin nyaman dengan opsi multilateral. Dari sini, rekomendasi kedua yang bisa diusulkan adalah adanya kebutuhan untuk menciptakan mekanisme bagi perundingan yang lebih serius dengan metode pemaksaan yang tepat. Dalam model ini, posisi Indonesia terhadap Israel tentu tidak akan banyak membantu namun posisi Indonesia terhadap Palestina akan sangat berbeda.

Isu lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan untuk melibatkan aktor yang tepat dalam proses perundingan/perdamaian. Proses Oslo meninggalkan aktor penting, Hamas, dalam proses perdamaian. Upaya untuk membawa Hamas ke perundingan tertutup oleh dua kendala: pertama, eksistensi Fatah dalam

resmi J-Street di <https://jstreet.org/>, diakses 20 November 2020.

politik domestik Palestina akan terganggu dan kedua, Israel, terutama kelompok-kelompok ultra-nasionalis, melihat Hamas sebagai sumber permasalahan dan cenderung enggan untuk berbicara dengan mereka. Karena itu, perlu ada dorongan untuk membangun kubu persatuan di Palestina agar Hamas, atau setidaknya concern mereka, dapat masuk/tersalurkan ke dalam proses perundingan. Proses ini sendiri tidaklah mudah. Salah satu alasannya adalah bagi Palestina, konflik Hamas-Fatah merupakan masalah domestik dan mereka cenderung menghindari intervensi pihak asing. Hanya saja, pelibatan semua aktor dalam proses perundingan/perdamaian merupakan sebuah keharusan. Dari tiga rekomendasi tersebut, penolakan secara total terhadap kesepakatan merupakan langkah yang tepat. Perlu ada sikap kritis pada poin-poin “kesepakatan abad ini” dan bagaimana meletakkan usulan ini dalam proses perdamaian yang menyeluruh.

Saat ini, dengan adanya pergantian kekuasaan dari Trump ke Joe Biden, “kesepakatan abad ini” menjadi mengambang. Biden tidak menjadikan isu Palestina-Israel sebagai isu utama dalam kebijakan luar negerinya dan terlihat hanya melanjutkan kebijakan para pendahulunya, dengan beberapa penyesuaian. Meski tidak melihat negosiasi antara Palestina dan Israel dimungkinkan dalam jangka waktu yang dekat, Biden melakukan beberapa perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat. Biden membuka kembali bantuan kepada Palestina dan UNRWA dan, melalui Menteri Luar Negeri Blinken, juga membuka kembali konsulat PLO di Washington, D.C. dan meletakkan kembali agenda Yerusalem sebagai agenda penting proses perdamaian serta menilai pembangunan pemukiman Yahudi sebagai hambatan bagi penyelesaian konflik.⁶⁸ Namun, hingga saat ini belum ada

proposal yang ditawarkan oleh Biden dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

⁶⁸ Youssef, Hesham, “10 things to know: Biden’s approach to the Israeli-Palestinian conflict,” USIP Commentaries, (10 Juni 2021), <https://www.usip.org/publications/2021/06/10-things->

[know-bidens-approach-israeli-palestinian-conflict](https://www.usip.org/publications/2021/06/10-things-know-bidens-approach-israeli-palestinian-conflict), diakses 6 Juni 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, Alexei, “Monopolization of violence in the Palestinian struggle,” *Defence and Peace Economics* 31, No. 8 (2020): 892-903.
- Abrahams, Alexei, et.al, Mostly deterred: an episodic analysis of Israel-Gaza conflict, (Oktober 2019), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465438, diakses 20 November 2020.
- Abrahams, Alexei, et.al., Not a cycle of violence: an episodic analysis of Israel-Gaza conflict, (Februari 2018), https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/eklor/files/cycles_february_2018.pdf, diakses 20 November 2020.
- Akram, Susan, “UNRWA and Palestinian refugees,” dalam *The Oxford handbook of refugee and forced migration studies*, eds., Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long, dan Nando Sigona (Oxford: Oxford University Press, 2014), 227-240.
- Anziska, Seth, “Neither two states nor one: The Palestine Question in the age of Trump,” *Journal of Palestine Studies* 46, No. 3 (2017): 57-74.
- Badie, Dina, “How AIPAC could lose its bipartisan status”, *The Conversation*, (14 Maret 2019), <http://theconversation.com/how-aipac-could-lose-its-bipartisan-status-113241>, diakses 20 November 2020.
- Bar-Siman-Tov, Yaacov, “United States and Israel since 1948: a ‘special relationship’?”, *Diplomatic History* 22, No. 2 (1998): 231-262.
- Berridge, G.R., *Diplomacy: theory and practice* (London: Palgrave Macmillan, 2010).
- Black, Ian, “This ‘deal of the century’ for the Middle East will be just another bleak milestone,” *The Guardian*, (30 Januari 2019), <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/30/donald-trump-israel-palestinians-middle-east>, diakses 16 Oktober 2020.
- Blau, Uri dan Josef Federman, “US duty free magnates fund controversial Israeli settlements”, *AP News*, (2 Juli 2019), <https://apnews.com/article/87e58e1f3779432fb353bb786794c6b7>, diakses 20 November 2020.
- Bowen, Jeremy, “Trump’s Middle East peace plan: ‘deal of the century’ is huge gamble”, *BBC News*, (29 Januari 2019), <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51263815>, diakses 16 Oktober 2020.
- Camarani, Daniele, Ed., *Comparative politics* (Oxford: Oxford University Press, 2020).
- Central Bureau of Statistic, https://www.gov.il/en/departments/central_bureau_of_statistics, diakses 16 Oktober 2020.
- Elgindy, Khaled, *The Middle East Quartet: a post-mortem* (Washington, DC.: The Brookings Institution, 2012).
- Elgindi, Khaled, “Trump’s dangerous vision for Palestine,” *Journal of Palestine Studies* 48, No. 4 (2019): 103-112.
- Gerges, Fawas A., “The transformation of Hamas,” *The Nation*, (25 Januari 2010), <https://www.thenation.com/article/transformation-hamas/>, diakses 20 November 2020.
- Gunning, Jeroen, “Peace with Hamas? The transforming potential of political participation”, *International Affairs* 80, No. 2 (2004): 233-255.
- Hacohen, Gershon, “A two state solution? Just not according to Clinton Parameters,” *BESA Center Perspective Paper*, No. 401 (30 Januari 2017).

- Hopkin, Jonathan, “The comparative method,” dalam David Marsh dan Gerry Stoker, Eds., *Theory and methods in political science* (New York: Palgrave MacMillan, 2010), 285-307.
- IMF, GFS Yearbook Questionnaire, (2019), <http://www.pmf.ps/pmf/documents/accounts/annual/2019/GFS-2019-en.pdf>, diakses 20 November 2020.
- Israeli settlements funding jumped since Trump: official data, Al Jazeera, 19 Mei 2019, <https://www.aljazeera.com/news/2019/5/15/israeli-settlements-funding-jumped-since-trump-official-data>, diakses 20 November 2020.
- Khalidi, Rashid I., “And now what? The Trump administration and the question of Jerusalem,” *Journal of Palestine Studies* 47, No. 3 (2018): 93-102.
- Khanin, Vladimir (Ze’ev), “Russian-Jewish political experience in Israel: patterns, elites and movements”, *Israel Affairs* 17, No. 1 (2011): 55-71.
- Khong, Yuen Foong, *Analogies at war: Korea, Munich, Dien Bien Phu, and the Vietnam decisions of 1965* (Princeton: Princeton University Press, 1992).
- Klein, Menachem, *A possible peace between Israel and Palestine: an insider account of the Geneva Initiative* (New York: Columbia University Press, 2007).
- Klein, Menachem, “ Hamas in power”, *Middle East Journal* 61, No. 3 (2007): 442-459.
- Knell, Yolande, US stops all aid to Palestinians in West Bank and Gaza, BBC, (1 Februari 2019), <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47095082>, diakses 16 Oktober 2020.
- Kydd, Andrew dan Barbara L. Walter, “Sabotaging the peace: the politics of extremist violence”, *International Organization* 56, No. 2 (2002): 263-296.
- Lasensky, Scott, “Paying for peace: the Oslo Process and the limits of American foreign aid”, *Middle East Journal* 58, No. 2 (2004): 210-234.
- Lustick, Ian S., “Israel’s migration balance: demography, politics, and ideology”, *Israel Studies Review* 26, No. 1 (2011): 33-65.
- Malley, Robert dan Husein Agha, “Camp David: the tragedy of errors”, *The New York Review*, (9 Agustus 2001), <https://www.nybooks.com/articles/2001/08/09/camp-david-the-tragedy-of-errors/>, diakses 20 November 2020.
- Mearsheimer, John J. dan Stephen M. Walt, *The Israel lobby and US foreign policy* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007).
- Montefiore, Simon Sebag, *Jerusalem: the biography* (New York: Alfred A. Knopf, 2011).
- Peace Now, *Construction of Settlement*, <https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/construction>, diakses pada 20 November 2020.
- Petras, James, *The power of Israel in the United States* (Atlanta: Clarity Press, 2006).
- Pillar, Paul R., “The Kushner Plan: Keeping Israeli-Palestinian peace out of reach,” *Journal of Palestine Studies* 48, No. 4 (2019): 113-120.
- PSR, *Public opinion poll No. 78*, (15 Desember 2020), <https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll%2078%20English%20fulltext%20December%202020.pdf>, diakses 27 Februari 2021.
- Pundak, Ron, “From Oslo to Taba: what went wrong?”, *Survival* 43, No. 3 (2001): 31-45.
- Qarmout, Tamer and Daniel Béland, “The politics of the international aid to the Gaza Strip,” *Journal of Palestine Studies* 41, No. 4 (2012): 32-47.
- Said, Edward W., *The end of the peace process: Oslo and after* (New York: Vintage, 2001).
- Said, Edward W., “The real meaning of the Hebron agreement”, *Journal of Palestine Studies* 23, No. 3 (1997): 31-36.

- Sanders, Jacinta, “Honest brokers? American and Norwegian facilitation of Israeli-Palestinian negotiations (1991-1993)”, *Arab Studies Quarterly* 21, No. 2 (1999): 47-70.
- Sayigh, Yezid, “Arafat and the anatomy of revolt”, *Survival* 43, No. 3 (2001): 47-60.
- Schulze, Kirsten E., “The Hebron agreement”, *The Mediterranean Politics* 2, No. 1 (1997): 201-205.
- Sharp, Jeremy M., “US foreign aid to Israel”, CRS Report, (16 November 2020).
- Sher, Gilead dan Adelaide Duckett, “Israel's peacemaking under security challenges: Implications of a retrospective outlook”, *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* 43, No. 3 (2020): 41-57.
- Shikaki, Khalil dan Dahlia Scheindlin, *The role of public opinion in the resilience/resolution of the Palestinian-Israeli conflict* (Ramallah: PSR, 2018).
- Shikaki, Khalid dan Dahlia Scheindlin, *Role of Public Opinion in the Resilience/Resolution of the Palestinian-Israeli Conflict*, *Palestinian-Israeli Pulse: A Joint Poll Report*, (December 2018), <https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Final%20policy%20report%20English%20Jan2019.pdf>, diakses 20 November 2020.
- Tharoor, Ishaan, “Trump’s ‘deal of the century’ is no deal at all,” *The Washington Post*, (29 Januari 2019), <https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/28/trumps-deal-century-is-no-deal-all/>, diakses 16 Oktober 2020.
- Tocci, Nathalie, “The Middle East Quartet and (in)effective multilateralism”, *Middle East Journal* 67, No. 1 (2013): 29-44.
- UNRWA, UNRWA in Figures, https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2020_eng_v2_final.pdf, diakses 27 Januari 2021.
- U.S. State Department, *Closure of the PLO office in Washington*, <https://www.state.gov/closure-of-the-plo-office-in-washington/>, diakses 16 Oktober 2020.
- U.S. State Department, *On US assistance to UNRWA*, <https://www.state.gov/on-u-s-assistance-to-unrwa/>, diakses 16 Oktober 2020.
- Wake, Chris, “An unaided peace? The (unitended) consequences of international aid on the Oslo peace process”, *Conflict, Security and Development* 8, No. 1 (2008): 109-131.
- Wanis-St. John, Anthony, *Backchannel negotiation: secrecy in the Middle East peace process* (New York: Syracuse University Press, 2011).
- Wardoyo, Broto, “Indonesia, DK, dan Palestina”, *Kompas*, (20 Juni 2018), <https://www-beta.kompas.id/baca/opini/2018/06/20/indonesia-dk-dan-palestina/>, diakses 20 November 2020.
- Wardoyo, Broto, “Pemerintahan Hamas dan Prospek Perdamaian”, *Global: Jurnal Politik Internasional* 8, No. 2 (2006): 79-90.
- White House, President Donald J. Trump keeps promise to open US Embassy in Jerusalem Israel, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-keeps-promise-open-u-s-embassy-jerusalem-israel/>, diakses 16 Oktober 2020.
- White House, *Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People*, <https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperty/>, diakses 16 Oktober 2020.
- White House, *Proclamation on Recognizing the Golan Heights as Part of the State of Israel*, <https://il.usembassy.gov/proclamation-on-recognizing-the-golan-heights-as-part-of-the-state-of-israel/>, diakses 16 Oktober 2020.

Broto Wardoyo | Proposal “Deal of the Century” dan Dampaknya bagi Proses Perdamaian Palestina-Israel

White House, Statement of President Trump on Jerusalem, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem/>, diakses 16 Oktober 2020.

Youssef, Hesham, “10 things to know: Biden’s approach to the Israeli-Palestinian conflict,” USIP Commentaries, (10 Juni 2021), <https://www.usip.org/publications/2021/06/10-things-know-bidens-approach-israeli-palestinian-conflict>, diakses 6 Juni 2022.

Zanotti, Jim, “US foreign aid to the Palestinians”, CRS Report, (12 Desember 2018).

Zartman, I. William, “Introduction,” dalam *How negotiations end: Negotiating behavior in the endgame*, ed., I. William Zartman (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 1-23.

BIOGRAFI

Broto Wardoyo adalah dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia yang memiliki minat akademiknya pada studi keamanan internasional, terutama studi mengenai perang skala kecil dan intelijen, studi diplomasi dan studi mengenai politik militer, khususnya untuk kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik.